

Analisis Pelembagaan Partisipasi Politik Akar Rumput melalui Gerakan Kelompok Tani di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

Mulyadi¹, Muhammad bin Abubakar², Taufik Abdullah³, Bimby Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh
Lhokseumaw, Aceh, 24355

E-mail Korespondensi : mulyadi_mm@unimal.ac.id

ABSTRACT

Increasing political participation is certainly not an easy job, there needs to be support from several parties or groups. One group that is considered capable of inviting people to increase political participation is farmer groups. Especially for people who live in rural areas. One of the villages that has a farmer group is Gampong Blang Cut, Peusangan District in Bireuen Regency. The purpose of the research is to find out the role of the farmer group in increasing community political participation and to find out the obstacles faced by farmer groups in increasing community political participation. The research method uses qualitative techniques. The results of this study indicate that; the level of participation of farmer groups tends to be low. Constraining factors such as gaps in the political capacity of farmer groups, fragmentation and limited resources, apathy and dependence on the government are often the main causes of the low political participation of farmer groups. This situation ultimately weakens the capacity of farmer groups to develop and fight for a political agenda that truly reflects their needs and aspirations. Therefore, systematic efforts are needed to restructure farmer group organizations to be more oriented towards political participation such as; (1) Recognition of Customary Values; (2) Community involvement in the decision-making process of village development; (3) Strengthening the partnership network of grassroots institutions; (4) Strengthening discussion and dialogue forums.

Keywords: Political Participation Institutionalization; Farmers Group; Gampog Development; Aceh

ABSTRAK

Meningkatkan partisipasi politik tentu saja bukan pekerjaan mudah, perlunya ada dukungan dari beberapa pihak ataupun kelompok. Salah satu kelompok yang dianggap mampu mengajak masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik adalah kelompok tani. Terutama bagi masyarakat yang hidup di pedesaan. Salah satu desa yang memiliki kelompok tani adalah Gampong Blang Cut Kecamatan Peusangan yang berada di Kabupaten Bireuen. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui peran kelompok tani tersebut dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kelompok tani dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Metode penelitian menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; tingkat partisipasi kelompok tani cenderung rendah. Faktor-faktor kendala seperti kesenjangan kapasitas politik kelompok tani, fragmentasi dan keterbatasan sumber daya, rasa apatis dan ketergantungan pada pemerintah seringkali menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi politik kelompok tani tersebut. Situasi tersebut akhirnya melemahkan kapasitas kelompok tani untuk mengembangkan dan memperjuangkan agenda politik yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Maka diperlukan upaya sistematis untuk merestrukturisasi organisasi kelompok tani agar lebih berorientasi pada partisipasi politik seperti; (1) Pengakuan Nilai-Nilai Adat; (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan proses pembangunan gampong; (3) Penguatan jaringan kemitraan lembaga akar rumput; (4) Penguatan forum diskusi dan dialog.

Kata Kunci: Pelembagaan Partisipasi Politik; Kelompok Tani; Pembangunan Gampog; Aceh

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris dengan sebagian besar penduduknya yang terlibat dalam sektor pertanian. Data menunjukkan bahwa sekitar 29% dari total angkatan kerja Indonesia bekerja di bidang pertanian (Manaroinsong, dkk. 2023). Namun, ironi dari kenyataan ini adalah bahwa petani sering kali menjadi kelompok yang terpinggirkan baik dalam aspek ekonomi maupun politik. Kesejahteraan petani seringkali terabaikan, dan mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya serta partisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka (Wahed, dkk. 2020; Elizabeth, 2007). Bahkan di banyak negara, partisipasi politik seringkali didominasi oleh kalangan elit, sementara kelompok akar rumput seperti petani sering termarjinalkan dan kurang terwakili dalam struktur politik formal (Amin, 2017; Haryanto, 2017).

Padahal kelompok petani, sebagai salah satu pilar penting dalam struktur sosial dan ekonomi pedesaan (Prasetyono, 2019). Mereka tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi tetapi juga sebagai platform sosial yang dapat membangun konsolidasi anggotanya untuk tujuan bersama. Dalam konteks demokrasi partisipatif, kelompok masyarakat di desa memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan politik dan sosial (Mukhrizal, dkk. 2023). Hal ini terutama penting di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi nasional dan petani mencakup sebagian besar populasi (Hidayah, dkk. 2022; Good Party, 2023). Bahkan di banyak desa dan daerah pedesaan, kelompok tani telah lama menjadi bagian integral dari komunitas. Kelompok ini biasanya dibentuk untuk tujuan-tujuan praktis seperti meningkatkan produktivitas pertanian, berbagi pengetahuan dan teknologi, serta memperjuangkan akses terhadap sumber daya pertanian (Handayani, dkk. 2019). Potensi kelompok tani tidak hanya berhenti di sana. Dengan struktur yang terorganisir dan basis anggota yang luas, kelompok tani memiliki kapasitas untuk mewujudkan kemandirian petani di era modern, bahkan sebagai agen perubahan yang signifikan dalam konteks politik lokal dan nasional (Lestari, dkk. 2023).

Berdasarkan data dan informasi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan organisasi masyarakat sebenarnya telah berupaya untuk terus meningkatkan partisipasi politik masyarakat di pedesaan melalui berbagai program dan kegiatan. Namun dalam praktiknya, mengintegrasikan kelompok tani ke dalam arena gerakan politik tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk rendahnya tingkat literasi politik di kalangan petani, keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi, serta hambatan sosial dan budaya yang membatasi partisipasi aktif, terutama bagi perempuan dan kelompok minoritas. Selain itu, tekanan ekonomi yang dihadapi oleh petani, seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim, sering kali membuat mereka lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari daripada terlibat dalam aktivitas politik. Faktor-faktor ini

tentu memerlukan pendekatan yang strategis dan inklusif untuk dapat diatasi.

Fenomena di atas menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pentingnya peran petani dalam perekonomian nasional terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik mereka. Padahal partisipasi politik merupakan komponen esensial bagi sistem demokrasi yang sehat dan inklusif (Pizzorno, 1970; Huntington, 1991; Kaim, M. 2021). Sebab memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan publik tetapi juga mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kaim, M. 2021). Oleh sebab itu, salah satu cara efektif untuk mendorong pelembagaan partisipasi politik tersebut adalah melalui gerakan kelompok tani.

Melalui gerakan kelompok tani tersebut, tidak hanya suara mereka dapat lebih terdengar, tetapi juga akan memperkuat demokrasi dari bawah ke atas. Sejarah gerakan sosial juga menunjukkan bahwa mobilisasi akar rumput dapat membawa perubahan signifikan dalam kebijakan publik (Xu, L., & Hu, X, 2011). Oleh sebab itu, gerakan kelompok tani memiliki peran penting dalam mengembangkan kesadaran politik, dan tentu juga dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang berdampak pada hidup mereka (OECD, 2006). Dengan memanfaatkan modal sosial seperti jaringan sosial dan kepercayaan antar petani, dapat menjadi kekuatan pendorong untuk meningkatkan partisipasi politik. Di sisi lain, gerakan akar rumput, yang memobilisasi komunitas untuk terlibat dalam proses politik, telah terbukti efektif dalam berbagai konteks perumusan kebijakan (Lowndes, V., Pratchett, L., & Stoker, G, 2006). Namun, tantangan seperti keberlanjutan momentum gerakan dan integrasi aksi lokal dengan tujuan politik yang lebih luas masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Apalagi peran partai politik lokal cenderung gagal dalam mengawal proses pembangunan sesuai aspirasi masyarakat di Aceh (Afrijal dan Helmi, 2022).

Maka, berkaitan tema penelitian ini, pembahasan akan berfokus pada bentuk pelembagaan partisipasi politik akar rumput melalui gerakan kelompok tani. Tujuannya untuk mengeksplorasi berbagai pola dan strategi yang digunakan untuk memberdayakan kelompok tani dalam konteks pelembagaan partisipasi politik, menganalisis keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam upaya melembagakan partisipasi politik kelompok tani sekaligus mengidentifikasi *best practice* untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut. Akhirnya dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran potensial gerakan kelompok tani dalam partisipasi politik, kita dapat bekerja menuju demokrasi yang lebih inklusif dan representatif, di mana semua segmen masyarakat memiliki suara yang seimbang dan kuat dalam proses politik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui proses observasi berbagai aktivitas dan lingkungan subjek penelitian, wawancara mendalam dengan subjek penelitian, dan analisis dokumen yang relevan (Gill, Paul et al, 2008). Desain informan melalui teknik purposive sampling (Campbell, S et al, 2020) yakni dengan memilih informan berdasarkan karakteristik tertentu seperti lokasi geografis, jenis usaha tani, dan ukuran kelompok tani yakni sebanyak 20 orang. Berdasarkan desain tersebut, wawancara dilakukan dengan pemimpin kelompok tani, anggota yang aktif dalam politik, penyuluh pertanian serta perwakilan pemerintah gampong dan LSM yang berada di lokasi Kecamatan Peudada, Juli dan Peusangan. Lokasi tersebut merepresentasikan sebagai Kecamatan yang memiliki luas lahan sawah dan kelompok tani yang cukup signifikan di Aceh. Adapun kelompok tani yang diklasifikasikan pada komoditas padi, jagung, kedelai juga kelompok ternak sapi. Analisis data menggunakan metode coding untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari wawancara. Teknik ini membantu mengungkap pola dan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi pelebagaan partisipasi politik. Sedangkan validasi temuan dilakukan dengan teknik member checking yakni mengonfirmasi temuan dengan peserta penelitian untuk memastikan interpretasi yang akurat dan relevansi temuan (Campbell, S et al, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok Tani Sebagai Wadah Perjuangan Petani

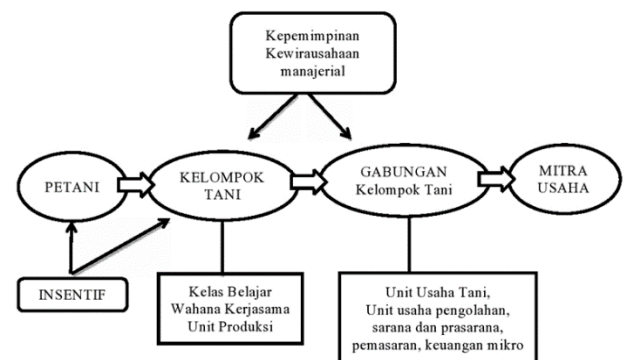
Sektor pertanian memiliki peran strategis terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan baku industri, bio-energi hingga penyerapan tenaga kerja (Renstra Kementan 2020-2024). Oleh sebab itu, untuk meningkatkan peran tersebut diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha yang berkualitas, andal, berkemampuan manajerial organisasi dan bisnis. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu membangun usahatani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, kapasitas dan kemampuan mereka harus ditingkatkan, salah satunya melalui pendekatan kelompok.

Pendekatan kelompok tersebut dimaksudkan untuk mendorong penumbuhan kelembagaan petani diantaranya melalui kelompok tani (poktan). Kelompok Tani merupakan sebuah organisasi non formal yang dibentuk oleh para petani, peternak, atau pekebun yang memiliki kesamaan tujuan, kepentingan, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya. Kelompok Tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk

meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Keberadaan Kelompok Tani pada akhirnya akan menjadi wadah untuk memperkuat dan memperjuangkan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri. Namun, dalam pembentukan kelompok tani secara formal harus sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Permentan No.67 tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Kelembagaan Petani.

Kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani yang berfungsi sebagai wadah belajar, wahana kerjasama dan membangun kesadaran anggota petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memperjuangkan kepentingan petani (Aulia, dkk. 2022). Tumbuh kembangnya kelompok tani sangat dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti adanya kawasan usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama, adanya kader yang menggerakkan, adanya kegiatan yang manfaatnya dirasakan oleh anggotanya, adanya dorongan dan motivasi untuk melakukan perubahan. Unsur pengikat tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip adanya kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan dan kemitraan. Dengan demikian, gerakan kelompok tani memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan petani melalui organisasi yang dibentuk oleh para petani sendiri, serta memperjuangkan kepentingan petani dengan cara yang sehat dan mandiri. Dengan demikian, gerakan Kelompok Tani memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan petani melalui organisasi yang dibentuk oleh para petani sendiri, serta memperjuangkan kepentingan petani dengan cara yang sehat dan mandiri.

Gambar 1. Paradigma Pengembangan Kelembagaan Petani



Sumber: Diolah dari Permentan no.67/2016

Eksistensi Kelompok Tani di Kabupaten Bireuen

Sektor pertanian adalah paling banyak serap tenaga kerja di Aceh. Kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor ini juga sangat tinggi, mencapai 30%. Sangat wajar jika Pemerintah Aceh memberi perhatian besar pada sektor ini, khususnya pada kelompok tani (humas.acehprov.go.id, 2019). Sebab

keberlangsungan pertumbuhan ekonomi petani dan keluarganya sangat dipengaruhi oleh kelompok tani. Petani dapat menggunakan kelompok tani sebagai wadah untuk mendapatkan informasi tentang berbagai hal, seperti mempererat hubungan antara anggota kelompok tani, sistem usaha tani kontemporer, solusi masalah pertanian, sebagai ruang belajar, belajar berorganisasi, dan sebagai unit produksi dalam upaya untuk mengembangkan usaha secara ekonomi. Meskipun petani membentuk dan mengelola kelompok tani, banyak juga yang dibentuk oleh program pemerintah yang mengharuskan petani menjadi anggota. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah kelompok tani di Kabupaten Bireuen sebanyak 2.247 Kelompok Tani dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 1. Jumlah Kelompok Tani (Poktan) Menurut Kelas Kelompok di Kota Bireuen

Tahun	Kelas Kelompok					Jumlah
	Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Tidak diketahui	
2020	1.253	235	19	-	641	2.148
2021	1.453	253	18	-	523	2.247

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian/SIMLUHTAN, 2021

Jika diuraikan, jenis usaha pertanian yang dijalankan oleh para kelompok tani meliputi usaha pertanian perorangan, perusahaan pertanian berbadan hukum, dan usaha pertanian lainnya. Usaha pertanian perorangan dimaksudkan bahwa unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Mayoritas pertanian perorangan di Kabupaten Bireuen mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Sedangkan perusahaan pertanian berbadan hukum merupakan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau ijin dari instansi yang berwenang. Selain itu, usaha pertanian lainnya yang dikelola oleh bukan perorangan maupun bukan perusahaan pertanian, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha pertanian secara bersama pada satu hamparan atau kawasan tertentu, misalnya usaha pertanian di dayah, lembaga pemasyarakatan, kantor pemerintahan, dan usaha pertanian lainnya.

Berdasarkan data dan informasi BPS (2023) diketahui jumlah unit usaha pertanian di Kabupaten Bireuen sebanyak 69.557 unit tahun 2023. Diklasifikasikan dalam usaha pertanian perorangan sebanyak 69.522 unit, perusahaan pertanian berbadan hukum sebanyak 6 unit, usaha pertanian lainnya sebanyak 29 unit. Sedangkan jumlah dan persentase usaha pertanian perorangan menurut subsektor didominasi oleh tanaman pangan sebanyak 48.101 tani, perkebunan sebanyak

26.052 tani, peternakan 21.543 tani, hortikultura 16.567 tani, perikanan sebanyak 3.370 tani, jasa pertanian 866 tani dan kehutanan sebanyak 357 tani. Di wilayah Kabupaten Bireuen, usaha pertanian perorangan paling banyak terdapat di Kecamatan Peusangan yakni sebanyak 7.329 unit (10,54%). Adapun komoditas pertanian yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Bireuen (tahun 2023) adalah padi sawah, kelapa, ayam kampung, pinang, sapi potong, pisang dan kambing potong (BPS, 2023).

Kelompok Tani sebagai Media Sosialisasi Politik

Pada konteks masyarakat agraris khususnya di wilayah Kabupaten Bireuen, kelompok tani memainkan peran yang sangat penting. Selain sebagai wadah untuk pengembangan sektor pertanian, kelompok tani juga memiliki potensi besar sebagai media sosialisasi politik (Qin, Y, 2023). Melalui pertemuan dan kegiatan rutin, kelompok tani dapat menjadi *platform* untuk meningkatkan literasi politik, mendorong partisipasi, dan memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput. Oleh sebab itu kelompok tani dapat berfungsi sebagai platform bagi anggotanya untuk berbagi informasi dan berdiskusi mengenai isu-isu politik. Dalam konteks ini, dari informasi dan observasi dilapangan kelompok tani menjadi wahana sosialisasi politik dimana setiap anggota mendapatkan beberapa pemahaman, diantaranya; (a) pemahaman tentang hak dan kewajiban politik mereka; (b) mengikuti perkembangan isu-isu politik terkini baik di tingkat lokal maupun nasional; (c) berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak pada sektor pertanian khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Kabupaten Bireuen. Bahkan tidak jarang di beberapa sampel wilayah penelitian diketahui kelompok tani sering kali menjadi saluran utama untuk menyebarkan informasi politik di komunitas gampong. Informasi tersebut diperoleh karena sering mengadakan pertemuan bulanan dimana selain membahas isu-isu pertanian, mereka juga sering berdiskusi dengan tokoh politik lokal, partai politik lokal, LSM, untuk memberikan sosialisasi mengenai program-program pemerintah dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi. Kelompok tani biasanya mengadakan pertemuan rutin yang dihadiri oleh sebagian besar anggotanya. Pertemuan ini dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai isu-isu sosial, agama, ekonomi, politik terkini, dan kebijakan pemerintah.

Selain itu, dengan jumlah kelompok tani yang cukup banyak dan terorganisir dengan baik, dengan sendirinya dapat terbentuk jaringan sosial yang luas dan kuat diantara para anggotanya. Sehingga informasi yang disampaikan dalam berbagai pertemuan kelompok dapat dengan cepat menyebar ke masyarakat yang lebih luas. Bahkan tidak jarang kelompok tani dapat memainkan peran penting dalam proses mobilisasi politik, terutama selama masa kampanye pemilu. Mereka para kelompok tani sering mendukung bahkan terlibat dalam mengorganisir kampanye partai politik dan para kontestan pemilu yang pro terhadap kepentingan pertanian. Hal ini

dapat diketahui dari hasil wawancara dengan salah seorang ketua Kelompok Tani di Kecamatan Peusangan yang mengatakan bahwa;

“Kita setiap ada perhelatan pemilu Presiden, Gubernur Aceh, maupun Bupati di Bireuen, misalnya 2019 lalu, kita kelompok tani turut membantu bahkan terlibat dalam penyelenggara pemilu seperti menjadi anggota KPPS, saksi juga ikut berkampanye untuk peserta pemilu yang memiliki janji terhadap program-program pembangunan di sektor pertanian”(Bireuen, Oktober, 2023)

Kelompok Tani Sebagai Penghubung Aspirasi Dengan Pemerintah

Kelompok tani berperan sebagai mediator antara petani dan pemerintah. Mereka menyuatkan kebutuhan dan aspirasi anggota mereka kepada pejabat pemerintah dan legislator melalui (a) Penyampaian aspirasi pada forum-forum resmi; (b) Audiensi dengan pejabat pemerintah untuk menyampaikan usulan dan keluhan; (c) Berpartisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan. Contoh nyata: Kelompok tani "Raja Rimba" berhasil memperjuangkan perbaikan irigasi dengan melobi pemerintah gampong melalui berbagai audiensi dan proposal tertulis. Contoh lain yakni keberhasilan kelompok tani untuk mendapatkan bantuan alat mesin pertanian dari pemerintah seperti yang dilakukan oleh Kelompok Tani Makmu Beuade, Balee Me Kutablang, Kecamatan Juli yang diketuai oleh Bapak Lukman dan kelompok tani Mudah Rezeki, Bate Raya yang diketuai oleh Junaidi Ramli tahun 2020. Kelompok tani tersebut telah berhasil mendapatkan bantuan alat mesin pertanian dari Kementerian Pertanian melalui aspirasi Ir H.TA Khalid anggota DPR-RI. Juga bagi kelompok tani Aron Muda ketua Tarmizi Ahmad di Gampong Geulumpang Bungkok dan Kelompok Tani Sabar ktua Syahrizal Husen, Juli Tambo Tanjong, Kecamatan Juli. Kelompok tani tersebut mendapatkan bantuan mesin cultivator setelah melakukan audiensi dengan pejabat pemerintah gampong hingga pemerintah Kabupaten Bireuen. Situasi yang sama juga dilakukan kelompok tani Mutiara Tani dari Cot Mee Kutablang, Uteun Rimba Pante Peusangan Juli, dan Kelompok Blang Rambong, Peusangan. Kelompok tani tersebut juga mendapatkan bantuan alat mesin pertanian setelah melakukan pendekatan dengan pemerintah gampong maupun tokoh politik nasional asal Kabupaten Bireuen.

Dari informasi tersebut dapat dipahami bahwa kelompok-kelompok tani tersebut mampu menjembatani aspirasi para petani kepada pemerintah setempat. Salah satunya dengan membangun jaringan komunikasi yang efektif dengan tokoh politik dan pemerintah, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan mereka. Selain itu, mereka juga sering terlibat dalam penyelenggaraan program-program pendidikan politik dan pemberdayaan baik dari pemerintah, penyelenggara

pemilu, LSM, partai politik bahkan dari institusi pendidikan (Universitas). Melalui pendidikan politik para kelompok tani tersebut mampu meningkatkan literasi politik anggota. Misalnya melalui pelatihan tentang proses pemilihan umum, termasuk bagaimana cara memilih yang benar, workshop mengenai hak-hak politik dan kewajiban warga negara, diskusi kelompok mengenai isu-isu politik terkini dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Hingga pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota kelompok tani. Kondisi ini sejalan seperti yang dikatakan oleh Ketua Kelompok Tani Makmur Jaya di Kecamatan Peusangan dalam wawancara;

“paling sering kita berdiskusi dengan tokoh-tokoh politik lokal, bertukar ide dan masukan ke caleg-caleg, bahkan kita pernah kedatangan tim dari kampus maupun LSM untuk melakukan sosialisasi politik seperti pemilu, dalam program tersebut dimana saya dan anggota yang lain dibekali tentang berbagai aspek politik dan demokrasi” (Bireuen, Oktober 2023)

Tantangan Pelembagaan Partisipasi Politik Kelompok Tani

Pelembagaan partisipasi politik masyarakat desa, dalam konteks ini merujuk pada proses formalisasi dan penguatan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk terlibat secara aktif dan bermakna dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Mukhrizal, dkk, 2023; Noviar & Priyanti, 2023). Ini bukan sekadar tentang memberikan hak suara dalam pemilihan umum, tetapi lebih jauh lagi, tentang memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam setiap tahap siklus kebijakan, mulai dari perumusan hingga implementasi dan evaluasi (Landry, J & Angeles, L, 2011).

Pentingnya suara petani dalam kebijakan pertanian tidak bisa dilebih-lebihkan. Petani, dengan pengalaman langsung mereka di lapangan, memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang dalam sektor pertanian. Mereka yang paling memahami dampak langsung dari kebijakan pertanian, mulai dari regulasi penggunaan lahan, subsidi input pertanian, hingga kebijakan harga dan perdagangan produk pertanian. Tanpa kontribusi aktif dari petani, kebijakan pertanian beresiko menjadi tidak relevan, tidak efektif, atau bahkan kontraproduktif (Mathiason & Powell, 1972). Dalam konteks inilah kelompok tani muncul sebagai wadah potensial untuk memfasilitasi dan memperkuat partisipasi politik petani. Kelompok tani, yang pada awalnya dibentuk sebagai unit produksi dan pembelajaran bersama, memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi entitas yang lebih dinamis dan berpengaruh dalam lanskap politik pertanian. Mereka dapat menjadi jembatan antara petani individu dengan pembuat kebijakan, mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan petani, serta menjadi platform untuk mobilisasi dan advokasi kolektif.

Pelebagaan partisipasi politik kelompok tani merupakan upaya penting dalam memperkuat suara petani dalam proses pembuatan kebijakan pertanian. Namun, proses ini tidak lepas dari berbagai problematika yang perlu diidentifikasi dan diatasi. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, ada beberapa problematika utama dalam pelembagaan partisipasi politik kelompok tani di wilayah Kabupaten Bireuen antara lain:

1. Kesenjangan Kapasitas Politik

Mayoritas kelompok tani di Kabupaten Bireuen masih memiliki struktur organisasi yang primordial. Fokus utamanya pada fungsi produksi dan ekonomi. Mereka biasanya memiliki bidang-bidang dalam struktur organisasi seperti produksi, pemasaran, dan keuangan, namun jarang memiliki bidang khusus yang menangani isu-isu kebijakan politik atau advokasi. Akibatnya, tidak ada mekanisme formal dalam organisasi untuk mengidentifikasi, membahas, dan memperjuangkan aspirasi politik yang relevan dengan anggota. Dalam banyak kelompok tani, tidak ada posisi atau peran khusus yang ditugaskan untuk menangani urusan politik dan kebijakan. Hal ini menyebabkan kurangnya fokus dan keahlian dalam menangani isu-isu politik. Ketika isu-isu kebijakan muncul, seringkali tidak ada individu atau tim yang memiliki kapasitas dan mandat jelas untuk meresponnya. Akibatnya banyak anggota kelompok tani belum memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem politik, proses pembuatan kebijakan, dan mekanisme advokasi yang efektif. Hal ini dapat menyebabkan partisipasi yang kurang bermakna atau bahkan kontraproduktif.

Selain itu, kepemimpinan dalam kelompok tani seringkali didominasi oleh figur-figur yang memiliki kekuatan ekonomi atau status sosial tinggi, bukan berdasarkan kapasitas politik atau kemampuan advokasi. Hal ini dapat mengakibatkan bias dalam representasi kepentingan anggota. Oleh sebab itu struktur hierarkis organisasi dalam banyak kelompok tani cenderung memusatkan pengambilan keputusan pada segelintir pemimpin. Ini dapat mengakibatkan kurangnya representasi aspirasi mayoritas anggota dalam keputusan-keputusan politik kelompok. Proses bottom-up yang melibatkan partisipasi luas anggota dalam perumusan posisi politik kelompok seringkali absen.

2. Fragmentasi dan Keterbatasan Sumber Daya

Dari informasi dan data yang didapat diketahui bahwa kelompok tani di Kabupaten Bireuen cenderung terfragmentasi, dengan banyak kelompok kecil yang beroperasi secara independen. Kurangnya koordinasi dan jejaring antar kelompok tani menyebabkan sulitnya membangun suara kolektif yang kuat dalam arena politik. Fragmentasi ini juga membuat kelompok tani rentan terhadap manipulasi politik, di mana kelompok-kelompok kecil dapat dengan mudah dikooptasi oleh kepentingan politik tertentu apalagi menjelang pemilu. Sehingga suara kelompok tani mudah untuk dimobilisasi.

Selain soal fragmentasi tersebut, keterbatasan dana dan sumber daya manusia juga merupakan kendala utama bagi kelompok tani dalam mengorganisir kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik. Akibat tekanan ekonomi, fokus utama kelompok tani petani adalah cenderung pada kelangsungan hidup ekonomi mereka dan mengurangi perhatian dan energi yang dapat mereka alokasikan untuk aktivitas politik. Bahkan banyak kelompok tani yang bergantung pada kontribusi sukarela dari anggotanya yang seringkali tidak mencukupi untuk mendanai program-program kelompok tani.

Persoalan lain juga masih banyak anggota kelompok tani yang memiliki pengetahuan terbatas tentang politik dan proses demokrasi. Kurangnya pendidikan politik ini membuat mereka sulit untuk memahami pentingnya partisipasi politik dan bagaimana cara berpartisipasi secara efektif. Contoh nyata pada salah satu Kelompok Tani di Peusangan yang hanya mampu mengadakan pertemuan bulanan tanpa program tambahan karena keterbatasan dana. Bahkan banyak kelompok tani yang jarang melakukan pertemuan jika tidak memberi manfaat langsung terhadap mereka, seperti mendapatkan uang saku, subsidi pupuk dan lain-lain. Ada kecenderungan sikap apatis di kalangan petani yang merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan memberikan perubahan signifikan. Sikap ini diperparah oleh pengalaman-pengalaman masa lalu dimana aspirasi mereka sering kali diabaikan oleh para politisi yang terpilih saat pemilu. Situasi tersebut diperkuat oleh anggota kelompok tani di Peusangan dalam wawancara yang mengatakan bahwa;

“Banyak diantara kita para petani, khususnya kelompok tani di Peusangan merasa enggan untuk terlibat dalam kegiatan politik karena sering kecewa dengan janji-janji politik yang tidak pernah terealisasi. Banyak para caleg atau politisi saat kampanye yang isinya berjanji akan mensejahterakan para petani, namun ketika sudah terpilih mereka abai bahkan tidak peduli dengan petani, mereka butuh kelompok tani hanya untuk mendulang suara saja” (Bireuen, Oktober 2023).

Di satu sisi, keberlanjutan momentum gerakan memang sering kali menjadi kendala utama karena mobilisasi akar rumput biasanya didorong oleh urgensi dan kebutuhan akan tindakan segera. Di sisi lain, mengintegrasikan aksi lokal dengan tujuan politik yang lebih luas sering kali sulit dilakukan, terutama ketika berhadapan dengan resistensi dari elit politik yang merasa terancam oleh meningkatnya partisipasi dari kelompok akar rumput.

3. Ketergantungan pada Pemerintah

Ketergantungan kelompok tani pada pemerintah merupakan problematika serius yang dapat mengompromikan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dan independen dalam proses politik. Banyak kelompok tani di Kabupaten Bireuen masih sangat bergantung pada program dan bantuan pemerintah. Sehingga ketergantungan pada pemerintah tersebut telah menciptakan *self-censorship* di kalangan

anggota kelompok tani. Mereka mungkin enggan untuk mengekspresikan pandangan kritis atau mengambil posisi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, bahkan ketika kebijakan tersebut merugikan kepentingan mereka. Akibat ketergantungan ini dapat menghambat kemampuan kelompok tani untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, karena adanya kekhawatiran akan hilangnya akses terhadap bantuan.

Aspek-aspek dari masalah ini biasanya seputar persoalan; *pertama*, finansial dalam pengelolaan usaha tani. Banyak kelompok tani di Kabupaten Bireuen bergantung pada bantuan dan subsidi untuk operasional mereka, baik bantuan dari pemerintah gampong maupun pemerintah daerah. Situasi ini menciptakan dilema, di mana kelompok tani mungkin enggan untuk mengkritik atau menentang kebijakan pemerintah karena takut kehilangan dukungan finansial yang penting bagi kelangsungan hidup organisasi mereka. *Kedua*, ketergantungan program. Seringkali aktivitas utama kelompok tani terikat dengan program-program pemerintah. Situasi inilah yang dapat membatasi otonomi kelompok dalam menentukan prioritas dan strategi mereka sendiri, termasuk dalam hal partisipasi politik. *Ketiga*, patronase politik. Hubungan patronase antara pejabat pemerintah daerah dan pemimpin kelompok tani dapat menciptakan konflik kepentingan. Pemimpin kelompok tani lebih cenderung mengakomodasi kepentingan patron politik mereka daripada memperjuangkan aspirasi anggota.

Dampak dari persoalan di atas, dapat dikatakan bahwa ketergantungan yang berlebihan tersebut akan dapat menumpulkan inisiatif dan kreativitas kelompok tani dalam mencari solusi mandiri atas masalah mereka. Situasi tersebut dapat melemahkan kapasitas kelompok tani untuk mengembangkan dan memperjuangkan agenda politik yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ketika kelompok tani terlalu bergantung pada pemerintah, mereka menjadi rentan terhadap perubahan rezim atau kebijakan politik. Apalagi jika terjadi perubahan dalam pemerintahan akan dapat mengancam kelangsungan program dan dukungan yang mereka andalkan. Bahkan cenderung melahirkan distorsi representasi, dimana ada risiko bahwa kelompok tani yang terlalu dekat dengan pemerintah mungkin lebih mewakili kepentingan pemerintah daripada kepentingan petani yang mereka wakili, mengkompromikan peran mereka sebagai penyalur aspirasi petani yang sejati.

Untuk mengatasi problematika ini, diperlukan upaya sistematis untuk merestrukturisasi organisasi kelompok tani agar lebih berorientasi pada partisipasi politik, serta strategi untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada pemerintah sambil tetap mempertahankan hubungan konstruktif. Ini mungkin melibatkan pengembangan sumber pendanaan alternatif, peningkatan kapasitas internal, dan membangun jaringan dukungan yang lebih luas di luar pemerintah.

Best Practice Pelembagaan Partisipasi Politik Kelompok Tani

Partisipasi politik akar rumput melalui gerakan kelompok tani adalah langkah strategis untuk memberdayakan petani dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Kelompok tani, dengan struktur organisasi yang sudah mapan dan jaringan yang kuat di tingkat komunitas, memiliki potensi besar untuk menjadi platform partisipasi politik yang efektif. Kelompok tani memainkan peran penting dalam ekonomi dan struktur sosial pedesaan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi tetapi juga sebagai platform sosial yang dapat menyatukan anggotanya untuk tujuan bersama. Dalam konteks demokrasi partisipatif, kelompok tani memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan politik dan sosial.

Meskipun kontribusi signifikan sektor pertanian, petani juga sering menghadapi tantangan besar dalam hal representasi politik. Kebijakan publik yang tidak mempertimbangkan suara dan kebutuhan mereka dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan pengembangan pedesaan yang tidak merata (Keare, 2001). Kurangnya pendidikan politik, sumber daya terbatas, dan hambatan struktural seperti akses yang sulit ke arena politik formal menjadi faktor penghambat utama bagi petani untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Dari hasil analisis yang diperoleh, ada beberapa langkah alternatif yang dapat dikembangkan untuk merumuskan strategi pelembagaan partisipasi politik kelompok tani di Kabupaten Bireuen, diantaranya melalui; (1) Peningkatan akses sumber daya. Untuk mengatasi keterbatasan ini beberapa strategi dapat diterapkan yang merujuk pada keseriusan pemerintah daerah Bireuen untuk menyediakan dana hibah untuk kelompok tani yang berfokus pada program peningkatan kapasitas politik anggota kelompok tani. Selain itu juga dapat melalui program kerjasama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada pemberdayaan masyarakat petani serta mengadakan kegiatan pemberdayaan melalui acara komunitas atau program CSR perusahaan lokal maupun dari pihak Universitas. Kemitraan kelompok tani dengan NGO atau LSM akan dapat menyediakan sumber daya dan dukungan teknis yang diperlukan petani. Kelompok tani harus dilatih dan dikembangkan untuk memiliki kapasitas yang lebih baik dalam berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan di wilayah mereka. Sebab pendidikan dan pengembangan kapasitas dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang berdampak pada hidup mereka. Dengan kapasitas ini, kelompok tani akan dapat berperan sebagai perwakilan resmi petani dalam dialog dengan pemerintah dan pembuat kebijakan. (2) Meningkatkan akses informasi sebagai upaya cegah sikap apolitis. Strategi ini dapat dilakukan melalui pendanaan gampong untuk mengembangkan jaringan internet, radio radio komunitas, dan platform digital gampong. Pemerintah Gampong juga dapat memberikan akses informasi dengan menyediakan

bahan bacaan seperti brosur dan poster yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah gampong di Kabupaten Bireuen dapat mengadakan dialog rutin dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan transparansi kebijakan untuk pembangunan di gampong.

Merujuk dari uraian di atas, ada beberapa catatan sebagai *best practice* yang dapat dilakukan sebagai upaya penguatan kelembagaan partisipasi politik kelompok tani, diantaranya; (1) Pengakuan Nilai-Nilai Adat: melibatkan nilai-nilai adat dan tradisi dalam peraturan gampong dapat membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat dan tradisi dalam kebijakan gampong, sehingga masyarakat merasa terlibat dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan. (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan proses pembangunan gampong. Masyarakat harus memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan gampong. Hal ini akan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang berdampak pada hidup mereka. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan dalam memberikan usulan dan saran-saran yang kemudian dibawa ke Musrenbangdes. (3) Penguatan jaringan kemitraan lembaga akar rumput. Selain kelompok tani, lembaga akar rumput seperti LKMD, PKK, dan Karang Taruna di tiap gampong dapat diaktifkan sebagai wadah untuk mendorong kemitraan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan solidaritas bersama. Lembaga ini dapat membantu sesama anggota dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan di tiap gampong. (4) Penguatan forum diskusi dan dialog. Dengan membentuk forum-forum diskusi reguler di tingkat gampong dan kecamatan di mana kelompok petani dapat berdialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah dan anggota legislatif.

Dengan melaksanakan langkah-langkah dan *best practice* tersebut, partisipasi politik akar rumput melalui gerakan Kelompok Tani dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan pembangunan gampong yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kabupaten Bireuen.

4. KESIMPULAN

Kelompok tani di Kabupaten Bireuen memiliki potensi besar untuk menciptakan ruang demokrasi di ranah akar rumput. Setidaknya kelompok tani memiliki peran signifikan diantaranya; sebagai media komunikasi bagi anggota kelompok tani, sebagai sosialisasi politik, bahkan sebagai penghubung aspirasi kelompok tani dengan pemerintah. Namun dalam observasi dan analisis yang dilakukan bahwa tingkat partisipasi kelompok tani cenderung rendah. Faktor-faktor kendala seperti kesenjangan kapasitas politik kelompok tani, fragmentasi dan keterbatasan sumber daya, rasa apatis dan ketergantungan pada pemerintah seringkali menjadi

penyebab utama rendahnya partisipasi politik kelompok tani tersebut. Situasi tersebut akhirnya melemahkan kapasitas kelompok tani untuk mengembangkan dan memperjuangkan agenda politik yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ketika kelompok tani terlalu bergantung pada pemerintah, mereka menjadi rentan terhadap perubahan rezim atau kebijakan politik. Apalagi jika terjadi perubahan dalam pemerintahan akan dapat mengancam kelangsungan program dan dukungan yang mereka andalkan.

Untuk mengatasi problematika ini, diperlukan upaya sistematis untuk merestrukturisasi organisasi kelompok tani agar lebih berorientasi pada partisipasi politik, serta strategi untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada pemerintah sambil tetap mempertahankan hubungan konstruktif. Oleh sebab itu, beberapa *best practice* upaya penguatan kelembagaan partisipasi politik kelompok tani di Kabupaten Bireuen dapat dilakukan seperti; (1) Pengakuan Nilai-Nilai Adat: melibatkan nilai-nilai adat dan tradisi dalam peraturan gampong dapat membantu meningkatkan partisipasi politik masyarakat; (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan proses pembangunan gampong; (3) Penguatan jaringan kemitraan lembaga akar rumput. Selain kelompok tani, lembaga akar rumput seperti LKMD, PKK, dan Karang Taruna di tiap gampong dapat diaktifkan sebagai wadah untuk mendorong kemitraan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan solidaritas bersama; (4) Penguatan forum diskusi dan dialog. Meskipun kelompok tani menghadapi berbagai kendala dan tantangan, dengan strategi yang tepat, kelompok tani dapat menjadi motor penggerak bagi demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Investasi dalam pendidikan politik, peningkatan akses sumber daya, dan pengembangan infrastruktur informasi merupakan langkah-langkah kunci untuk memberdayakan kelompok tani dalam peran mereka sebagai agen perubahan politik

DAFTAR PUSTAKA

- Afrijal & Helmi (2022). Pelaksanaan Otonomi Khusus di Bawah Kekuasaan Partai Politik Lokal di Aceh. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. Vol. 7, No. 4. Pp.1-6. DOI: <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2509>
- Aulia, M, Reza.,Deras, S.,Hutabarat, Y (2022). Partisipasi Petani Dalam Kegiatan Kelompok Tani dan Kaitannya Dengan Produktivitas Padi Sawah di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Agriseip*. Vol. 23, No. 2, Pp. 18-26. DOI 10.17969/agriseip.v23i2.26962
- Amin, Khairul. (2017) Elit Dan Kekuasaan Pada Masyarakat Desa Studi Relasi Antara Pemerintah dan Masyarakat di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. *Jurnal Sosiologi USK*. Vol. 11, No. 2, Pp. 167-187. Retrieved from <https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/10096>. Date accessed: 09 November 2023.

- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research In Nursing* : JRN, Vol. 25, No. 8), Pp. 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Elizabeth, Roosganda. (2007). Fenomena Sosiologis Metamorphosis Petani: Ke Arah Keberpihakan Pada Masyarakat Petani Di Pedesaan Yang Terpinggirkan Terkait Konsep Ekonomi Kerakyatan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. 25 (1), 29-42 : <https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/5291>
- Gill, Paul & Stewart, Kate & Treasure, Elizabeth & Chadwick, Barbara. (2008). Methods of data collection in qualitative research: Interviews and focus groups. *British Dental Journal*. 204. 291-5. 10.1038/bdj.2008.192.
- Good Party. (2023). The Power of Grassroots Movements in Political Change. Available at: <https://goodparty.org/blog/article/grassroots-movement>. Date accessed; 09 November 2023
- Hidayah, Ibtihal.,Yulhendri.,Susanti, N. (2022). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Salangka Nagari*. Vol. 1, No. 1, Pp, 28-37. DOI: <https://doi.org/10.24036/jsn.v1i1.9>
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Cet.1 – Yogyakarta: PolGov
- Handayani, W, Azwita.,Tedjaningsih, T.,Rofatin, B. (2019). Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Usahatani Padi. *Jurnal Agristan*. Vol. 1, No. 2, Pp. 80-88. DOI: DOI : 10.37058/ja.v1i2.1375
- Huntington, Samuel, P. (1991). Democracy's Third Wave. *Journal of Democracy*, Vol. 2, No. 2, Pp. 12-34.<https://www.journalofdemocracy.org/articles/democracys-third-wave/>
- Humas.acehprov.go.id (2019). Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja, dalam <https://humas.acehprov.go.id/sektor-pertanian-paling-banyak-serap-tenaga-kerja/>. Diakses pada 23 Januari 2023
- Kaim, M. (2021). Rethinking Modes of Political Participation: The Conventional, Unconventional, and Alternative. *Democratic Theory*, 8 (1), 50-70. <https://doi.org/10.3167/dt.2021.080104>
- Keare, D. H. (2001). Learning to Clap: Reflections on Top-Down versus Bottom-Up Development. *Human Organization*, 60 (2), 159–165. <http://www.jstor.org/stable/44126893>
- Landry, J., & Angeles, L. (2011). Institutionalizing Participation in Municipal Policy Development: Preliminary Lessons from a Start-Up Process in Plateau-Mont-Royal. *Canadian Journal of Urban Research*, 20(1), 105–131. <http://www.jstor.org/stable/26193857>
- Lestari, M, Diah.,Kurnianto, B, Tri.,Faisal, H, Nur.,Solikah, U, Nur. (2023). Peran Kelompok Tani Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Petani di Era Modern di Kabupaten Tulungagung. *Agribis*. 9 (2). Pp. 8-17. DOI: <https://doi.org/10.36563/agribis.v9i2.848>
- Lowndes, V., Pratchett, L., & Stoker, G. (2006). Local Political Participation: The Impact of Rules-In-Use. *Public Administration*, 84(3), 539–561. DOI:10.1111/j.1467-9299.2006.00601.x
- Mathiason, J. R., & Powell, J. D. (1972). Participation and Efficacy: Aspects of Peasant Involvement in Political Mobilization. *Comparative Politics*, 4(3), 303–329. <https://doi.org/10.2307/421556>
- Manaroinsong, Geraldo.,Pangkey,M, S.,Mambo, R. (2023) Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Di Desa Palelon Kecamatan Modoinding. *Jurnal Administrasi Publik JAP*. No. 2 Vol. IX, Pp. 223-235. DOI: <https://doi.org/10.35797/jap.v9i3.47490>
- Noviar, I., & Priyanti, E. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), Pp. 213–220. DOI: <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.2929>
- OECD. (2006). *The New Rural Paradigm*. Paris: OECD.
- Pizzorno, A. (1970). An introduction to the theory of political participation. *Social Science Information*, 9(5),29-61. <https://doi.org/10.1177/053901847000900503>
- Prasetyono, Dwi, W. (2019). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Sebagai Pilar Pemberdayaan Petani. *Prosiding PKM-CSR*, Vol. 2, 1285-1293.DOI: <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v2i0.458>
- Qin, Y. (2023). Grassroots governance and social development: theoretical and comparative legal aspects. *Humanit Soc Sci Commun*, Vol.10 (331). DOI: <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01830-8>
- Renstra Kementan 2020-2024. Available at [https://rb.pertanian.go.id/upload/file/RENSTRA KEMANTAN 2020-2024 REVISI 2 \(26 Agt 2021\).pdf](https://rb.pertanian.go.id/upload/file/RENSTRA_KEMANTAN_2020-2024_REVISI_2_(26_Agt_2021).pdf)
- Uhlener, C, Jean. (2015). *Politics and Participation*. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (second edition), Twenty Five Volume Set. Pp. 504-508. Elsevier.
- Wahed, M., Iriani Sri Setiawati, R., & Asmara, K. (2020). Fenomena Sosiologis Petani Pedesaan yang Terpinggirkan di Indonesia. *OECOMICUS. Journal of Economics*, 5(1), 24–37. DOI: <https://doi.org/10.15642/oje.2020.5.1.24-37>
- Xu, L., & Hu, X. (2011). *The intermediary mechanism of social fairness perceptions between social capital and farmers' political participation: Empirical research based on masking and mediating effects*. *Frontiers in Psychology*. Frontiers.